

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

1.1. Simpulan

Simpulan yang didapat yaitu terkait dengan pembahasannya mengenai analisis Objek Pajak Penghasilan Pasal 21, penulis memahami mana saja yang termasuk dalam Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, adapun yang termasuk dalam Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak PER 16/PJ/2016. Objek Pajak utama dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Penghasilan itu sendiri.

CV. SD yang merupakan klien dari HR Consulting dalam hal ini juga melakukan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Dapat disimpulkan bahwa CV. SD sudah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah benar, dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Hasil penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu NIHIL, sehingga CV. SD tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, jika hasil penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tidak NIHI, maka CV. SD menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri, tanpa melibatkan pihak ketiga dalam hal ini HR. Consulting.

1.2 Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil analisis dan pengamatan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di HR Consulting yaitu, untuk CV. SD untuk dapat menyediakan data yang ada lebih cepat, dan melakukan penyusunan data lebih akurat sehingga dalam melakukan penghitungan pajaknya, tidak perlu lagi menunggu waktu lebih lama untuk mendapatkan data yang diminta. Perusahaan juga sebaiknya lebih menyediakan karyawan khusus dibidang akuntansi agar kesediaan data lebih cepat diproses, dan penyajian datanya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2016, *PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*, Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Farouq, 2018, *Hukum Pajak di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hidayat, dan Purwana, 2017, *Perpajakan: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Yogyakarta, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Pramukti, dan Primaharsya, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Ratnawati, dan Hernawati, 2015, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Resmi, 2016, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: C.V Andi Offset.
- Republik Indonesia, 2007, *Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan dan Tata Cara Perpajakan*, Lembaran Negara RI tahun 2007, Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 2008, *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh)*, Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 2009, *Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, Lembaran Negara RI tahun 2009, Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Lembaga Negara RI tahun 2009, Jakarta: Sekretariat Negara.